



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Jumat

Tanggal: 05 November 2021

Halaman: 2

DPRD KOTA YOGYAKARTA
SUARA WAKIL RAKYAT
JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP. (0274) 540650

RASIONALISASI DEFISIT RAPBD 2022
Pertahankan Belanja, Dongkrak Potensi Penerimaan

YOGYA (KR) - Legislatif dan eksekutif kini tengah intensif melakukan pembahasan detail rencana kerja anggaran tahun depan. Seiring adanya rasionalisasi defisit RAPBD 2022, maka potensi penerimaan daerah harus didongkrak guna mempertahankan pos belanja yang sudah direncanakan.

Ketua DPRD Kota Yogya H Danang Rudyatmoko, mengungkapkan dalam KUA PPAS RAPBD 2020 yang sudah disahkan per Agustus lalu, defisitnya mencapai 8,36 persen dari total RAPBD 2022 sebesar Rp 2,012 triliun. Akan tetapi pada Oktober lalu terbit SK Menteri Keuangan nomor 170/2021 maupun Peraturan Menteri Keuangan nomor 116/2021 yang mengamanatkan defisit anggaran tidak boleh melebihi 5 persen. "Makanya perlu ada rasionalisasi. Harapan saya pos belanja itu dipertahankan karena untuk kepentingan masyarakat. Justru penerimaan daerah yang harus digenjot," urainya.

Pos penerimaan daerah yang dimaksud, imbuh Danang, terutama pada tiga aspek yakni pendapatan asli daerah (PAD), dana transfer dari pusat dan dana perimbangan. Khusus PAD, sektor pajak tidak perlu dinaikkan guna tidak membebani wajib pajak. Akan

H Danang Rudyatmoko
Ketua DPRD Kota Yogya



KR-Ardhi Wahdan

tetapi lebih pada menggali potensi retribusi, menaikkan target pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan serta pendapatan lain-lain yang sah.

Di samping itu, OPD yang berpotensi bisa menambah penerimaan daerah pun didorong berinovasi untuk mendongkrak pendapatan. Dicontohkannya Dinas Perdagangan agar bisa menangkap potensi lapak digital, Dinas Perhubungan membuat sistem digital informasi kapasitas parkir serta OPD lain untuk menggulirkan kegiatan yang memiliki timbal balik terhadap pendapatan daerah.

"Inovasi dari tiap OPD ini sangat penting karena imbasnya bagi pembangunan kota cukup luas. Terutama menguatkan iklim investasi Kota Yogya di tengah era digital. Dampaknya, daya saing meningkat dan ekonomi tumbuh," jelasnya.

Selain itu, Danang juga mendorong agar tiap OPD yang memiliki program unggulan agar tidak ragu mengusulkan dana alokasi khusus (DAK) ke pemerintah pusat, baik DAK fisik maupun non fisik. Pihaknya selaku lembaga dewan pun siap mendukung karena pembiayaan melalui DAK akan mengurangi beban anggaran daerah.

(Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat DPRD Kota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Bagian Perekonomian Pengemb. P			
3. BPKAD			

Yogyakarta, 19 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005